



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 02 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (tinggal dirumah orangtua Penggugat yang bernama ibu XXXXX), berdomisili elektronik di amira02@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 449/SK.KH/11/2024/PA.Blcn tanggal 18 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setarap 01 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, (tinggal dirumah orangtua Tergugat yang bernama XXXXX);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 24 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat diatas, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah bersama, di Desa Setarap, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, pindah lagi kerumah kontrakan, di Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2018;
 - 3.2 ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-10-2021;Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

5.1 Bahwa Tergugat selalu pergi dan pulang kerumah orangtua Tergugat pada saat ada masalah dengan Penggugat tanpa ada penyelesaian dan bahkan Tergugat sampai tidak pulang kerumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

5.2 Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti di pukul dibagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah;

5.3 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan juga anak-anaknya, karena Tergugat mengelola sendiri keuangannya dan hanya memberikan secara berjatah kepada Penggugat, dan itu pun jika Penggugat memintanya terlebih dahulu;

5.4 Bahwa Tergugat sering mempersoalkan masalah anak dan bahkan sampai berani mengambil paksa anak dari Penggugat;

5.5 Bahwa Tergugat tidak mengakui anak keduanya yang bernama Aina Safitri sebagai anak kandungnya dengan Penggugat;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Januari 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat, tanpa sepengetahaun Tergugat dan beberapa lama kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah kontrakan tersebut;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat, identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasa Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin maupun mediator eksternal pengadilan yang telah bersertifikat;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik tetapi para pihak tidak menyetujuinya dan mereka bersepakat melaksanakan mediasi secara manual;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Miftah Faridi, S.H.I. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara;

Kehadiran Tergugat setelah mediasi

Bahwa, setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam dalil dan tuntutan gugatannya yaitu jika gugatan Cerai Gugat Penggugat dikabulkan maka:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai Penggugat, dengan TERGUGAT sebagai Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk telah bersepakat perdamaian sebagian yang akan diterangkan selanjutnya meskipun dalam perkara pokok perceraian baik Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama ingin meneruskan perceraian dalam perkara a quo;
2. Bahwa anak yang bernama sebagai berikut:
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2018;
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-10-2021akan diasuh atau hadhanah Penggugat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



3. Bahwa meskipun anak yang bernama Za ANAK dan ANAK dalam asuhan Penggugat, Penggugat dilarang untuk menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Bahwa untuk biaya nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 2 atas, Penggugat tidak memberatkan Tergugat dengan menuntut nominal atau jumlah yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tersebut, dan akan menerima berapapun nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat baik melalui Penggugat maupun langsung kepada kedua anak tersebut;
5. Bahwa kesepakatan mengenai hak asuh ini dimuat pada Putusan dalam perkara a quo;

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Maret 2017 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat. Penyebab lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat malam hari di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti dipukul di bagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



3. SAKSI III, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti dipukul di bagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah selain itu Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 November 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan dan menawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik sebagaimana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik akan tetapi para pihak menyatakan tidak menyetujuinya dan menghendaki mediasi secara manual sehingga mediasi dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faridi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara dan Perubahan gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 yang disebabkan Tergugat selalu pergi dan pulang kerumah orangtua Tergugat pada saat ada masalah dengan Penggugat tanpa ada penyelesaian dan bahkan Tergugat sampai tidak pulang kerumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti di pukul dibagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan juga anak-anaknya, karena Tergugat mengelola sendiri keuangannya dan hanya memberikan secara berjatah kepada Penggugat, dan itu pun jika Penggugat memintanya terlebih dahulu, Tergugat sering mempersoalkan masalah anak dan bahkan sampai berani mengambil paksa anak dari Penggugat serta Tergugat tidak mengakui anak keduanya yang bernama Aina Safitri sebagai anak kandungnya dengan Penggugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengubah gugatannya secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam dalil dan tuntutan gugatannya yaitu jika gugatan Cerai Gugat Penggugat dikabulkan maka Penggugat dengan Tergugat mencapai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagai apabila gugatan Cerai Gugat Penggugat dikabulkan maka:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai Penggugat, dengan TERGUGAT sebagai Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk telah bersepakat perdamaian sebagian yang akan diterangkan selanjutnya meskipun dalam perkara pokok perceraian baik Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama ingin meneruskan perceraian dalam perkara a quo;
2. Bahwa anak yang bernama sebagai berikut:
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2018;
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-10-2021akan diasuh atau hadhanah Penggugat;
3. Bahwa meskipun anak yang bernama Za ANAK dan ANAK dalam asuhan Penggugat, Penggugat dilarang untuk menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Bahwa untuk biaya nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 2 atas, Penggugat tidak memberatkan Tergugat dengan menuntut nominal atau jumlah yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tersebut, dan akan menerima berapapun nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat baik melalui Penggugat maupun langsung kepada kedua anak tersebut;
5. Bahwa kesepakatan mengenai hak asuh ini dimuat pada Putusan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terkait perubahan gugatan akibat adanya kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 maka perubahan tersebut dinilai oleh Hakim tidak melanggar hukum sehingga dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 dan saksi-saksi yaitu Mustamil bin Hare, Aliyah Bunga Lestari binti Hare serta Arman Efendy bin Sugianto;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2017 di KUA XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2018 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat. Penyebab lainnya saya tidak tahu dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti dipukul di bagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti dipukul di bagian kepala sehingga membuat kepala Penggugat sampai bocor dan banyak mengeluarkan darah selain itu Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun di mana Tergugat yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah berlawanan karena semua keterangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal paling tidak sejak setahun yang lalu sehingga telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak akhir tahun 2018 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir tahun 2018 serta telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يُعَدُّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْحُّحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَحَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحَيْثُ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِتَةً إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرُّ وَعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 03 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai Penggugat, dengan TERGUGAT sebagai Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk telah bersepakat perdamaian sebagian yang akan diterangkan selanjutnya meskipun dalam perkara pokok perceraian baik Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama ingin meneruskan perceraian dalam perkara a quo;
2. Bahwa anak yang bernama sebagai berikut:
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2018;
 - ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-10-2021

akan diasuh atau hadhanah Penggugat;

3. Bahwa meskipun anak yang bernama Za ANAK dan ANAK dalam asuhan Penggugat, Penggugat dilarang untuk menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Bahwa untuk biaya nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 2 atas, Penggugat tidak memberatkan Tergugat dengan menuntut nominal atau jumlah yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tersebut, dan akan menerima berapapun nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat baik melalui Penggugat maupun langsung kepada kedua anak tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



5. Bahwa kesepakatan mengenai hak asuh ini dimuat pada Putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang peremampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekereovereenkomsten verboden hef*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa hak hadhanah anak sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang memuat kesepakatan terkait hak hadhanah anak tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat, dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsesualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Biaya Perkara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2018 dan ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-10-2021 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, oleh **A. Syafiul Anam, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diwakili kuasanya secara elektronik di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



A. Syafiul Anam, Lc., M.H.
Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
1.	Panggilan	Rp1.400.000,00
2.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp1.545.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)